

SKRIPSI

EFEK FAKTOR PENENTU PERMINTAAN AGREGAT TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

MUH. AKSA HADIM

A011181317



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

EFEK FAKTOR PENENTU PERMINTAAN AGREGAT TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

MUH. AKSA HADIM

A011181317



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

EFEK FAKTOR PENENTU PERMINTAAN AGREGAT TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh:

MUH. AKSA HADIM
A011181317

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 26
September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing I



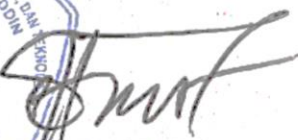
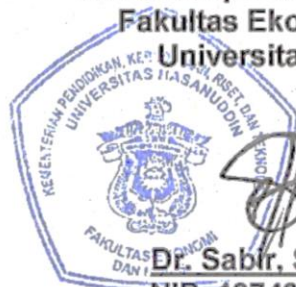
Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.
NIP. 19740715 200212 1 003

Pembimbing II



Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., MSi.
NIP. 19880113 201504 1 001

**Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

EFEK FAKTOR PENENTU PERMINTAAN AGREGAT TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN





disusun dan diajukan oleh:

MUH. AKSA HADIM
A011181317

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 26 September 2023 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®	Ketua	1. 
2.	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., MSi.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®	Anggota	3. 
4.	Dr. Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP, 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Aksa Hadim
NIM : A011181317
Jurusan/program studi : Ilmu Ekonomi/Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

“EFEK FAKTOR PENENTU PERMINTAAN AGREGAT TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN”

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2023

Yang membuat pernyataan,


Muh. Aksa hadim
A011181317

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa langit dan bumi, pemilik dari segala ilmu, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap makhluk yang dikehendaki-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in, atbaut tabiin dan orang-orang yang senantiasa istiqomah diatas sunnahnya. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi penelitian dengan judul "**Efek Faktor Penentu Permintaan Agregat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan**" dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, kesabaran, kesempatan, dan ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih tak terhingga untuk kedua Orang tua peneliti yang tercinta dan tersayang yaitu Bapak Hadim DB dan Mama Nur Dewi N, tanpa henti selalu mendoakan dan mengupayakan semua yang terbaik untuk anaknya.
3. Saudara peneliti, Nurhidayah H dan La Ode Marsudi yang selalu memberikan saran, motivasi dan doa.
4. Keluarga besar peneliti yang tanpa hentinya juga selalu memotivasi dan mendoakan sehingga bisa meraih gelar sarjana.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Sabir, S.E. M.Si., CWM[®] dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fill'ardy Yunus, S.E., M.Si. terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti.
6. Dosen penguji, Ibu Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM[®]. dan Ibu Dr.

- Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E. atas kontribusi berupa kritik dan saran yang diberikan kepada peneliti.
7. Penasehat Akademik Bapak Dr. Amanus Khalifah Fill'ardy Yunus, S.E., M.Si. terima kasih atas bimbingan, motivasi dan nasehat yang diberikan kepada peneliti selama kuliah.
 8. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®. dan Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Ibu Fitriwati Djam'an S.E., M.Si yang telah memberikan bantuan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
 9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah khususnya bapak dan ibu Dosen departemen Ilmu Ekonomi.
 10. Segenap Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terkhusus kepada pak Masse, pak Malik, pak Rahim, pak Ambang, pak Oscar, pak Tarru, pak Bur, dan Ibu Ida yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti selama berkuliah.
 11. Sahabat dan Teman peneliti (pacalla, bakso hukum, d'cuza, sohibul iman, iea, bolang trip, m3m goks, runners f2) terima kasih karena selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi, terima kasih karena selalu ada disaat suka maupun duka serta telah mewarnai masa perkuliahan baik didalam maupun luar kampus peneliti dengan sangat indah dan memorable.
 12. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2018 (LANTERN) yang senantiasa selalu memberikan dukungan bantuan dan semangat hingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih telah kebersamai penulis bisa berproses sebagai mahasiswa di FEB UNHAS.

13. Teman-teman KKN Tematik 106 Posko Biringkanaya 2. terima kasih atas doa dan semangatnya.
14. Teman seperjuangan Kampus Merdeka Bank Indonesia Batch VI, terima kasih atas kebersamaan dan semangat belajar serta berproses di Bank Sentral.
15. Teman seperjuangan Kampus Merdeka Badan Pusat Statistik Batch I, terima kasih atas kebersamaan dan semangat belajar serta berproses tentang analisis dan literasi statistik.
16. Keluarga Besar Forum Studi Ekonomi Islam Universitas Hasanuddin (FOSEI UNHAS). yang telah memberikan pengalaman dan manfaat yang besar bagi peneliti dalam mengenal dunia Ekonomi Syariah. Terkhususnya untuk Kabinet Mengabdi.
17. Keluarga Besar Ekowowits Futsal Club Universitas Hasanuddin. yang telah memberikan pengalaman dan manfaat yang besar bagi peneliti.
18. Semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Tiada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik disisi-Nya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat berkah dari Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 26 September 2023



Muh. Aksa Hadim

ABSTRAK

Efek Faktor Penentu Permintaan Agregat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan

Sabir

Amanus Khalifah Fill'ardy Yunus

Muh. Aksa Hadim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit umum dan pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik regional bruto secara langsung maupun tidak langsung melalui jumlah UMKM di provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP dan UMKM). Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan data time series yang terdiri dari data tahun 2013 sampai 2019 dan data cross section yang terdiri dari 24 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi simultan dengan menggunakan aplikasi AMOS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung jumlah UMKM berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kredit umum secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB. Sedangkan secara tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB melalui jumlah UMKM. Kemudian pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sedangkan secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap PDRB melalui jumlah UMKM.

Kata Kunci: *Permintaan Agregat, Jumlah UMKM, PDRB, Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah.*

ABSTRACT

The Effect of Determining Factors of Aggregate Demand on Gross Regional Domestic Product in South Sulawesi Province

Sabir

Amanus Khalifah Fill'ardy Yunus

Muh. Aksa Hadim

This research aims to determine the influence of general credit and government expenditure on gross regional domestic product directly and indirectly through the number of MSMEs in South Sulawesi province. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Department of Cooperatives and UMKM (DISKOP and UMKM). The type of data used is panel data which is a combination of time series data consisting of data from 2013 to 2019 and cross section data consisting of 24 Regency/City in South Sulawesi province. The research method used in this research is simultaneous regression using the AMOS application. The results of this research show that the number of MSMEs directly has a significant effect on GRDP. General credit has no direct effect to GRDP. Meanwhile, indirectly it has no significant effect on GRDP through the number of MSMEs. Then government spending directly has a significant effect on GRDP. Meanwhile, indirectly it has a significant effect on GRDP through the number of MSMEs.

Keywords: *Aggregate Demand, Number of MSMEs, GRDP, General Credit, Government Expenditure.*

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Permintaan Agregat.....	13
2.1.1.1 Pasar Barang dan Kurva IS.....	14
2.1.1.2 Pasar Uang dan Kurva LM.....	14
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	16
2.1.4 Kredit Umum.....	18
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.5.1 Teori Musgrave	19
2.1.5.2 Hukum Wagner (Wagner's Law)	20
2.2 Hubungan Teoritis Antara Varibel.....	20
2.2.1 Hubungan antara Jumlah UMKM dan PDRB	20
2.2.2 Hubungan antara Kredit Umum, Jumlah UMKM, dan PDRB.....	21
2.2.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Jumlah UMKM, dan PDRB	22
2.3 Tinjauan Empirik	23
2.4 Kerangka Pemikiran	25

2.5 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Definisi Operasional	31
3.5.1 Variabel Independen.....	31
3.5.2 Variabel Dependen	31
3.6 Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Selayar	35
4.1.2 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bulukumba.....	36
4.1.3 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng	37
4.1.4 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto.....	37
4.1.5 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Takalar.....	38
4.1.6 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Gowa	39
4.1.7 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sinjai.....	40
4.1.8 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Maros.....	41
4.1.9 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pangkep	42
4.1.10 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Barru.....	43
4.1.11 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Bone	44
4.1.12 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng	44
4.1.13 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Wajo	46
4.1.14 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Sidrap	47
4.1.15 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Pinrang	48
4.1.16 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Enrekang	49
4.1.17 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu	49
4.1.18 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Tana Toraja	50
4.1.19 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Utara	51
4.1.20 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Timur.....	52
4.1.21 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kabupaten Toraja Utara.....	52

4.1.22 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Makassar	54
4.1.23 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Pare-Pare	54
4.1.24 Gambaran Umum Struktur Ekonomi Kota Palopo	55
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	56
4.2.1 Perkembangan Jumlah UMKM 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	56
4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	57
4.2.3 Perkembangan Kredit Umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	59
4.2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	60
4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Kredit Umum, Pengeluaran Pemerintah, Terhadap PDRB, dan Jumlah UMKM.....	61
4.3.1 Pengaruh Kredit Umum terhadap PDRB.....	64
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB.....	65
4.3.3 Pengaruh Jumlah UMKM terhadap PDRB	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah dan Perkembangan Usaha Mirko Kecil dan Menengah (UMKM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2019.....	6
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah UMKM 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2013-2019 (Unit).....	57
Tabel 4.2 Perkembangan Produk DomestiK Regional Bruto (PDRB) 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2013-2019 (Triliun rupiah)	58
Tabel 4.3 Perkembangan Kredit Umum 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2019 (Milyar rupiah).....	59
Tabel 4.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2019 (Milyar rupiah).....	60
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Regresi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Kredit Umum terhadap PDRB Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung melalui Jumlah UMKM	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi senantiasa menjadi isu sentral dalam masalah pembangunan, pembangunan ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat demikian juga dengan pembangunan provinsi Sulawesi Selatan, tetap memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena diharapkan dapat menyelesaikan masalah perekonomian dan melakukan stabilisasi ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut pemerintah dapat menerapkan kebijakannya melalui kebijakan makro ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan ekonomi secara riil, yang berarti secara langsung maupun tidak langsung memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, peningkatan kegiatan ekonomi sulit untuk dicapai apabila stabilitas ekonomi terutama berkaitan dengan situasi perdagangan ataupun perindustrian masih belum memadai. Di sisi lain, stabilitas ekonomi juga akan memberikan kompensasi agar peningkatan pendapatan masyarakat dan nilai tambah produk daerah agar tidak mudah tergerus oleh arus inflasi atau kenaikan harga.

Salah satu upaya menciptakan perkuatan dan stabilitas ekonomi makro regional khususnya di provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan melalui peran dan kebijakan pemerintah provinsi untuk bersama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam menciptakan mekanisme industri yang meningkatkan nilai tambah dan pengembangan produk dari berbagai komoditas unggulan. Untuk itu perlu di upayakan pemanfaatan dan pengembangan berbagai sektor untuk mendukung kebijakan tersebut, salah satunya adalah kontribusi UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional, selain karena UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM akan memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat struktual, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan, 2011).

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak. Pada tahun 2019 wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota madya tercatat mempunyai sektor UMKM sebanyak 944.279 unit (Diskop dan UMKM Sulawesi Selatan, 2021). Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa persamaan variabel makro. Variabel tersebut dapat dianalisis melalui pengelolaan permintaan agregat yang membentuk kurva IS dan LM. Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang penting untuk dipahami, salah satunya yaitu karena tingkat suku bunga merupakan komposisi permintaan agregat antara investasi dan pengeluaran konsumsi (Hutabarat, 2010). Suku bunga yang tinggi akan mengurangi tingkat permintaan agregat, penyebab dari hal tersebut adalah naiknya tingkat suku bunga akan menurunkan tingkat investasi, sedangkan investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi (Dornbusch, 2008).

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang harus berjalan beriringan. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil di pengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kementrian keuangan. Sedangkan stabilitas

dan pertumbuhan pada sektor moneter dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Namun realita yang terjadi pada perekonomian di Indonesia saat ini adalah penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang belum dapat berjalan secara bersama (Sa'adah, 2013).

Sesuai dengan keseimbangan perekonomian pada permintaan agregat peran pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian pada sektor riil adalah melakukan kebijakan fiskal ekspansif yaitu pemerintah tetap menjaga pengeluaran pemerintah dengan kebijakan anggaran yang berimbang. Sama halnya pada sektor moneter, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan moneter ekspansif dalam menjaga stabilitas moneter melalui tingkat suku bunga, dan pengendalian jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat dari teori Pigou bahwa ketika terjadi kenaikan harga maka akan berpengaruh terhadap sektor riil bukan pada sektor moneter. Berbeda dengan pendapat dari Keynes yang menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan harga maka akan memberikan pengaruh terhadap sektor moneter.

Keberhasilan keseimbangan perekonomian pada permintaan agregat salah satunya bisa dilihat dari kesanggupan dalam penyediaan modal dan infrastruktur khususnya dalam rangka peningkatan kontribusi jumlah UMKM. Oleh karena itu, dengan kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat memberi perubahan dalam pertumbuhan output riil yang dijelaskan oleh perubahan penawaran uang atau perubahan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, Keynesian menganjurkan ekspansi kebijakan moneter dan fiskal sebagai pengaman dari defisiensi permintaan agregat yang efektif. Mereka yakin hal ini akan mendorong pengeluaran swasta. Efisiensi kebijakan moneter menurun ketika permintaan uang sangat elastis dan investasi inelastis (Tesfay, 2010).

Sebagai bagian integral dari kebijakan makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter didesain untuk mengendalikan fluktuasi perekonomian. Kebijakan moneter dibangun dengan suatu pandangan bahwa untuk mencapai berbagai tujuan seperti menjaga kestabilan harga dengan tingkat inflasi yang rendah dan membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terhadap jumlah uang beredar, tingkat bunga dan nilai tukar yang mempunyai peran dominan pada permintaan agregat, inflasi dan output. Kebijakan fiskal berurusan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan semua barang dan jasa publik melalui program administrasi, pembangunan dan kesejahteraan.

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan lemahnya perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi di negara kita, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sehingga dengan hadirnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berpotensi lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Sektor UMKM mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari krisis ekonomi dan moneter. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, karena selain berperan dalam perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilitasi sistem ekonomi yang ada (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2018).

Pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) sebanyak 56.534.591 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan (Bank Indonesia, 2020).

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh peranannya sebagai pelaku usaha terbesar, kontribusinya dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2015). UMKM memiliki potensi yang begitu besar namun kenyataannya UMKM masih mengalami masalah yang hingga kini masih menjadi kendala adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan.

Namun dengan potensi dan masalah yang ada, salah satu yang menjadi faktor pendukung untuk berkembangnya UMKM yaitu dengan besarnya potensi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan karena jumlah penduduknya yang cukup banyak mencapai 8.851.000 jiwa dan ditunjang oleh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 304 wilayah kecamatan serta 2.953 desa dan kelurahan (Diskop dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021). Selama kurun waktu 2013 sampai 2019 jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari dua puluh empat kabupaten, jumlah UMKM terbanyak ada di wilayah Kota Makassar yang mencapai 1.026.893 unit pada tahun 2013-2019. Berikut ini rincian perkembangan jumlah UMKM dan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel 1.1 : Jumlah dan Perkembangan Usaha Mirko Kecil dan Menengah (UMKM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2019.

Tahun	Jumlah UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM	Jumlah PDRB (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan PDRB
2013	860,810	4.41%	217589,13	7,07%
2014	894,163	8.46%	233988,05	7,00%
2015	916,232	11.14%	250802,99	6,70%
2016	919,660	11.55%	269401,31	6,90%
2017	922,802	11.93%	288814,17	6,72%
2018	923,302	11.99%	309156,19	6,57%
2019	944,279	14.54%	330506,38	6,45%

Sumber : Diskop dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, Data diolah. Badan Pusat Statistik, Berbagai edisi.

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama 7 tahun terakhir, namun disatu sisi pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan sehingga ada sebuah masalah dalam hal mendukung produktivitas PDRB khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, namun kondisi tersebut menunjukkan suatu hal yang positif karena dari hal tersebut pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hal itu harus banyak yang di kembangkan oleh pemerintah agar nantinya dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Riska, 2020).

Hal ini akan menjadi peluang besar bagi provinsi Sulawesi Selatan karena UMKM dan PDRB memiliki kaitan erat dalam pertumbuhan ekonomi, sebab merupakan salah satu pembuka jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI tercatat bahwa dari jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit. Itu menunjukan bahwa UMKM di Indonesia sangat bersinergi dalam membangun dan mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Sehingga dengan pangsa tersebut, maka dengan bertambahnya jumlah UMKM akan berpotensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDRB khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pemerintah memiliki kesempatan untuk memaksimalkan lagi perkembangan roda perekonomian dan mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi.

Di satu sisi keberadaan UMKM agar mampu bersaing dengan produk asing maka kemampuannya harus ditingkatkan. Kualitas produk UMKM harus lebih baik atau setidaknya setara dengan kualitas produk asing. Jika hal tersebut bisa tercapai maka barang impor tidak lagi menjadi ancaman bagi UMKM. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan pengkajian terkait dengan variabel internal dan eksternal. Variabel internal meliputi kemampuan diri untuk memproduksi kualitas barang, total penjualan harga, modal usaha, desain, kemampuan bersaing, dan kemampuan memilih jenis usaha. Ada pun variabel eksternal meliputi kran impor yang harus dibatasi, harga bahan baku, ongkos transportasi, jumlah pembeli, ongkos produksi, dan Teknologi.

Kedua variabel internal dan eksternal tersebut menjadi faktor yang menentukan keberhasilan UMKM dalam bersaing dengan produk asing. Oleh karena itu dalam rangka mencapai pengembangan UMKM secara optimal maka perlu dirumuskan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM selama ini. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah pengembangan UMKM dapat berjalan efektif dan sesuai

dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus terus ditingkatkan, mengingat sektor UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi daerah adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin (Prihatmo, 2001).

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pendapatan masyarakat. Dengan demikian meningkat atau menurunnya PDRB akan dipengaruhi oleh berbagai sektor. Pertumbuhan produk baik barang maupun jasa menjadi indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya perlindungan usaha berupa ketersediaan lembaga permodalan dan juga dukungan infrastruktur sangatlah diperlukan. Penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas tentang bagaimana pengaruh ataupun kontribusi UMKM terhadap tenaga kerja namun disatu sisi belum banyak yang mengkaji tentang apa saja yang mendukung UMKM agar mampu untuk berkembang.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah terbatasnya lembaga yang memberikan bantuan permodalan dan posisi kredit tersebut belum sepenuhnya menjangkau UMKM. Masih banyak UMKM yang susah mendapatkan akses permodalan. Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan, baik berupa kredit modal kerja, maupun kredit investasi, menjadi sangat penting bagi perkembangan suatu usaha. Namun, bila penyaluran kredit kurang efektif, bukan tidak mungkin jika usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat akan terhambat. Modal bagi pelaku UMKM akan memiliki manfaat yang besar dalam mengembangkan usahanya. Modal tersebut dapat digunakan untuk pembelian barang-barang seperti mesin alat produksi, alat bantu produksi, dan lain

sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk UMKM. Oleh karena itu perlu adanya upaya mengatasi masalah UMKM dalam pemenuhan modal. Salah satunya pemerintah mulai mencanangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 agar penyaluran kredit dapat merata. Program KUR ini ditujukan bagi kelompok-kelompok UMKM di Indonesia.

Menurut (Andang, 2010) terkait proses pemulihan ekonomi di Indonesia, UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industri yang besar serta terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Selain itu UMKM juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) (Tambunan, 2008).

Selain itu, hal ini akan membuat pendapatan masyarakat bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Namun agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan di tempat atau mengalami kemunduran. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu seperti; modal (investasi dan pengeluaran pemerintah), tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2004). Penelitian-penelitian dalam beberapa tahun terakhir menemukan bahwa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi kredit produktif yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bezemer, 2014).

Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur,

pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal (Sukirno, 2010). Di satu sisi menurut (Nafziger, 2006), pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan output per kapita suatu negara. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator dalam mengukur kinerja perekonomian suatu daerah, faktor yang mempengaruhi PDRB antara lain adalah adanya belanja modal yang mampu meningkatkan produksi. Akumulasi modal atau biasa disebutkan dengan istilah investasi ini memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional (Todaro dan Smith, 2006).

Belanja / pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang di keluarkan oleh pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek faktor penentu permintaan agregat terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Jumlah UMKM sebagai acuan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan arah pembangunan untuk meningkatkan perekonomian. Maka dari itu penulis mengambil judul “**Efek Faktor Penentu Permintaan Agregat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Kredit Umum terhadap PDRB baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
3. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap PDRB secara langsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kredit Umum terhadap PDRB baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap PDRB secara langsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efek pengelolaan permintaan agregat terhadap PDRB di Sulawesi Selatan. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang masih ada hubungannya dengan permasalahan ini.
- b. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan masalah-masalah tingkat kesempatan kerja.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pemerintah
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku UMKM dan Pemerintah agar optimal dalam pengembangan UMKM.
- b. Bagi Akademisi
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor penentu dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- c. Bagi peneliti selanjutnya
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan penelitian yang berhubungan dengan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Permintaan Agregat

Permintaan agregat/ aggregate demand (AD) adalah hubungan antara tingkat harga agregat dengan jumlah output yang diminta. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Model IS-LM menggunakan tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Karena itu, model tersebut menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat bergeser (Mankiw:2003).

Dalam membentuk kurva permintaan, terlebih dahulu membentuk keseimbangan pasar uang dan pasar barang (Sims, 2012). Pasar barang merupakan sektor riil yang digambarkan dengan kurva IS, sedangkan pasar uang merupakan sektor moneter yang digambarkan dengan kurva LM (Cwik dan Wieland, 2009). Pergeseran kurva IS disebut sebagai pigou effect, dan pergeseran kurva LM disebut Keynes effect. Kedua sektor tersebut berkolaborasi dengan variabel-variabel tertentu dalam mempengaruhi tingkat suku bunga (Tanoto dan Basco, 2004).

Agregat demand adalah total output yang mampu dikonsumsi pada tingkat harga yang diberikan, permintaan agregat merupakan jumlah pengeluaran pada semua sektor produksi yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Permintaan agregat akan bergeser jika terjadi perubahan pada ekonomi makro, perubahan ekonomi makro pada dasarnya yaitu perubahan pada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Samuelson, 2001).

Variabel utama yang menyebabkan bergesernya permintaan agregat yaitu kebijakan ekonomi makro dibawah pengawasan pemerintah, yaitu kebijakan moneter, dalam kebijakan moneter, bank sentral mempengaruhi perekonomian melalui suplai uang atau jumlah uang yang beredar (Hein dan Ochsen, 2000). Variabel utama lainnya yang menyebabkan bergesernya permintaan aggregate yaitu kebijakan fiskal, dalam kebijakan ini pemerintah mempengaruhi perekonomian salah satunya yaitu melalui pengeluaran pemerintah (Samuelson, 1999).

2.1.1.1 Pasar Barang dan Kurva IS

Kurva IS merupakan kurva ekuilibrium pasar barang, kurva IS menggambarkan kombinasi suku bunga dan tingkat output, sehingga pengeluaran yang direncanakan sama dengan pendapatan (Hans dan Hoppe, 2007). Dalam model determinan pendapatan, investasi merupakan salah satu variabel eksogen dari pendapatan, karena model makro yang semakin komplit dengan dimasukkannya variabel tingkat suku bunga, maka investasi menjadi variable endogen, sehingga besar kecilnya investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga (Dornbusch, 2008).

Pasar barang dan kurva IS sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan investasi, ketika suku bunga tinggi, tingkat investasi rendah, dan sebaliknya, ketika tingkat suku bunga rendah, tingkat investasi tinggi (Palley, 2012), Dengan demikian tingkat suku bunga juga mengurangi permintaan agregat, karena suku bunga yang tinggi akan mengurangi investasi (Amano et al, 2012).

2.1.1.2 Pasar Uang dan Kurva LM

Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang terjadi di pasar uang (Erawati dan Llewelyn, 2002). Teori yang mendasari pembentukan kurva LM adalah teori preferensi likuiditas,

teori tersebut menyatakan bahwa tingkat bunga merupakan faktor yang sangat menentukan keinginan masyarakat untuk memegang uang, alasannya adalah tingkat bunga merupakan biaya peluang (opportunity cost), karena dengan memegang uang berarti seseorang akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga dari deposito atau obliges (Ramli, 2011).

Tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, saat penawaran uang tetap, perubahan tingkat suku bunga dapat terjadi apabila terjadi perubahan dalam permintaan uang. Logikanya perubahan permintaan uang terjadi saat pengeluaran agregat meningkat, semakin tinggi pengeluaran agregat atau konsumsi masyarakat, maka permintaan masyarakat akan uang juga semakin tinggi, sehingga tingkat suku bunga juga semakin tinggi (Cholis, 2007).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto. Adapun pengertian PDRB adalah keseluruhan nilai tambah yang diproduksi oleh semua unit usaha pada satu daerah tertentu dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain pengertian PDBR adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Fungsi PDRB sebagai indikator ekonomi sangat penting bagi daerah. PDRB adalah salah satu indikator untuk memberikan gambaran ekonomi di daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan PDRB didekati dengan tiga cara. Pertama, pendekatan produksi merupakan pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto (NTB) dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya dari masing nilai

produksi bruto tiap sektor ekonomi. Yang Kedua, pendekatan pendapatan, pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto. Dan yang terakhir pendekatan pengeluaran yaitu pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan di masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan yayasan sosial.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pendapatan masyarakat, sehingga akan mendukung tumbuhnya UMKM di suatu daerah. Sebaliknya jika PDRB semakin rendah, maka pendapatan masyarakat akan semakin kecil dan hal ini akan menghambat pertumbuhan UMKM.

2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pasal 35 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil tercantum bahwa Kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi beberapa kriteria yaitu usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kemudian usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan kriteria kedua yaitu usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan kriteria yang kedua yaitu usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting sebagai tulang punggung sistem ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM memainkan peranan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan antar pelaku usaha serta peran UMKM dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia (Ruch, Fearon dan Winters, 1992).

2.1.4 Kredit Umum

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2007).

Pengertian kredit menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Hasibuan, 2008).

Kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit (Ismail, 2010).

Secara umum kredit dapat dilihat dari segi kegunaan biasa digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin dengan masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Kemudian dapat juga di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kemudian dapat juga digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi atau bisa juga disebut kredit produktif. Kredit ini diberikan untuk membangun usaha yang nantinya akan

menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun usaha yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Musgrave

Teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave (1950) kebijakan anggaran mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu, Perpindahan Sumber Daya (Resources Transfer) adalah kebijakan anggaran pemerintah yang Mengarah pada perubahan dari pengeluaran pemerintah dimana hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengalihan input dari individu atau swasta kepada pemerintah atau publik. Kenaikan pengeluaran pemerintah ini akan mengakibatkan peningkatan penyerapan input dalam perekonomian negara sehingga kemampuan swasta guna memanfaatkan input akan mengalami penurunan dan sebaliknya (Olweny dan Chiluwe, 2012).

Kedua Distribusi Pendapatan atau (Incident) keadaan ini merupakan perubahan alokasi input yang diakibatkan karena adanya perubahan kebijakan dari pengeluaran pemerintah dan hal ini dapat berpengaruh pada distribusi pendapatan. Perekonomian negara yang telah mencapai keadaan full employment akan mengalami perubahan apabila pendapatan swasta mengalami penurunan hal ini diakibatkan karena peningkatan pengeluaran pemerintah (Barro, 1987).

Dampak positif dari pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai timbal balik atas peningkatan penggunaan input untuk publik. Ketiga Perubahan Output atau (Output Effect) merupakan analisis terkait dengan bagaimana fungsi pajak untuk mengatur pendapatan keuangan

sebagai dasar dari perubahan pajak. Keadaan ini menjadikan pengalihan sumber daya yang digunakan masyarakat juga mengalami peningkatan.

b. Hukum Wagner (Wagner's Law)

Teori ini dikemukakan oleh Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap Gross National Product. Teori Wagner biasa dikenal dengan Hukum Wagner (Wagner's Law) yaitu apabila pendapatan per kapita suatu negara meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan mengalami peningkatan (Peacock and Wiseman, 1961).

2.2 Hubungan Teoritis Antara Varibel

2.2.1 Hubungan antara Jumlah UMKM dan PDRB

Perkembangan jumlah UMKM pada dasarnya dapat diukur dengan melihat angka pertumbuhannya. Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Industrialisasi dapat menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun. Sumbangan kegiatan industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Arsyad, 2010). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil pengamatan Arsyad bahwa pada tingkat nasional, terjadi peningkatan sumbangan kegiatan industri terhadap PDB.

Menurut Kristiyanti (2012:68), pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kondisi ekonomi saat ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak.

Dengan usaha mikro,kecil menengah, akan memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan nasional yang selama ini didominasi oleh perusahaan– perusahaan besar dan padat modal (*capital intensive*).

2.2.2 Hubungan antara Kredit Umum, Jumlah UMKM, dan PDRB

Peningkatan terhadap jumlah kredit yang disalurkan akan membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan unit usaha dan juga akan menyebabkan bertambahnya produksi UMKM, berarti hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya output daerah. Setiap penyaluran kredit umum memberikan peran yang besar terhadap PDRB, karena untuk memperoleh nilai output atau PDRB yang besar, pengaruh melalui jumlah UMKM untuk mendukung perkembangannya membutuhkan biaya yang besar dan bisa diperoleh melalui pinjaman dana yaitu kredit.

Akses kredit bagi pengusaha sektor informal sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha sektor informal. Apabila pengusaha sektor informal mengakses kredit pada lembaga keuangan maka akan meningkatkan usahanya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan keberadaan ataupun eksistensi dari UMKM.

Pemberian kredit dipandang sebagai dukungan yang berdaya tinggi dalam mempengaruhi jumlah UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika modal bertambah maka pendapatan juga bertambah. Dengan kata lain jika modal usaha bertambah maka usahanya akan lebih besar dan penghasilan juga akan semakin besar. Sebaliknya jika modal berkurang maka pendapatan juga berkurang. Dengan kata lain jika modal usaha sedikit maka pendapatannya juga sedikit (Asfia Murni, 2006:67). Penyaluran kredit perbankan terutama yang ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat berdampak terhadap

pertumbuhan ekonomi secara nasional, dimana pada tahun 2005 merupakan tahun pengembangan UMKM. Sidang Majelis Umum PBB telah menetapkan tahun 2005 sebagai The International Year of Microcredit (Tahun Kredit Mikro Internasional) yang diresmikan di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 18 November 2004.

2.2.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Jumlah UMKM, dan PDRB

Faktor penting yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dengan PDRB sebagai parameternya ialah jumlah industri, adanya industri yang semakin banyak kedepannya akan menjadi pendorong akan meningkatnya nilai pada PDRB sektor industri khususnya UMKM dan dari pengeluaran pemerintah yaitu peran dari keterlibatan dengan adanya suatu belanja pemerintah yang nanti akan mampu memperbaiki daerah dalam pembangunannya sehingga baiknya suatu keuangan pada daerah tersebut dapat dicerminkan oleh baiknya suatu pengeluaran pemerintah. Dalam sebuah penelitian tentang jumlah industri dengan nilai koefisien yaitu sejumlah 29765,2 dapat diartikan setiap kenaikan variabel jumlah industri sebesar 1% maka meningkatkan pertumbuhannya sebesar 29765,2% dan nilai koefisiennya dari pengeluaran pemerintah yaitu sejumlah 0.0036 sehingga dapat diartikan setiap kenaikan variabel Pengeluaran Pemerintah 1% maka meningkatkan pertumbuhannya sebesar 0.0036%. (Laxa, A. T., & Soliestyo, A, 2020).

Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Jumlah UMKM yaitu dengan meningkatnya Jumlah UMKM akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah sehingga akan mempengaruhi PDRB. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat.

2.3 Tinjauan Empirik

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang di lakukan. Adapun tinjauan empiric yaitu:

Romer (2000) “Keynesian Macroeconomic Without The LM Curve” menemukan bahwa kondisi pada pengaruh variabel makro pada pasar uang menggunakan model Keynes dan Hick, penelitian ini juga melihat hubungan antara pasar uang dengan inflasi. Dan hasil yang ditunjukkan adalah terjadi hubungan signifikan antara pasar uang dengan inflasi, dan tingginya penawaran agregat pada pasar uang menyebabkan inflasi yang tinggi sehingga terjadi fluktuasi ekonomi pada jangka pendek.

Abdul Halim (2020) “Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju” dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kita lihat bahwa perkembangan pendapatan UMKM yang meningkat saat itu ialah UMKM yang sudah ada atau yang sudah lama bergerak didalamnya dan adapun UMKM yang baru namun belum berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju.

Tien Yustini (2015) “Pengaruh Suku Bunga, Jumlah Perusahaan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja bagi UMKM di Sumatera Selatan” Pada koefisien untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,077473, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap UMKM. Artinya setiap kenaikan 1 persen dari pertumbuhan ekonomi, maka UMKM akan mengalami peningkatan sebesar

1,077473 persen. Nilai probabilitas yang dimiliki variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatra Selatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena apabila pertumbuhan ekonomi naik maka pendapatan masyarakat naik, begitu pula dengan konsumsi masyarakat naik dan output pun naik.

Nichlatul (2016), menganalisis pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianalisis dari beberapa penelitian yang serupa mengenai pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil yang didapatkan dari menganalisis beberapa penelitian, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Keterkaitan kredit berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi hanya terlihat di negara-negara dengan tingkat pembangunan yang telah mencapai level yang cukup baik. Pada tingkat individu bank, bank akan mendorong intermediasi finansial secara optimal dengan memberikan suku bunga kredit yang lebih kompetitif, apabila manajemen bank telah mencapai tingkat efisiensi biaya tertentu dalam memperoleh dan mengolah informasi dari debitur secara berkala (Bose dan Cothren, 1996; 1997).

Dari hasil penelitian Hapsari (2014), pengujian variabel jumlah unit UKM secara parsial menghasilkan nilai t-hitung sebesar 1.656 dan nilai probabilitas 0,1285 yang menunjukkan bahwa nilai prob. > 0,05 sehingga variabel jumlah unit UKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Raselawati (2011) bahwa variabel

jumlah unit UKM memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar $0,247 < 0,05$ yang menunjukkan pengaruh yang signifikan. Menurut Hanum (2010) yang menyatakan bahwa jumlah unit UMKM memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB di sektor industri di Sumatera Utara.

Penelitian Raselawati (2012) menyebutkan bahwa investasi UKM memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar $0,013 < 0,05$ yang berarti mempunyai pengaruh signifikan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014) juga menyatakan bahwa modal UKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota batu dengan nilai probabilitas sebesar $0,0052$. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ilegbinosa (2015) yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan UKM memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria dengan nilai probabilitas sebesar $0,2286$.

2.4 Kerangka Pemikiran

Jumlah unit usaha berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM. Semakin banyak jumlah unit usaha, maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya jumlah UMKM memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dikarenakan kehadiran UMKM ini memiliki efek berganda bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM yang tinggi memiliki potensi produktifitas yang tinggi, kondisi ini tentunya dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian karena semakin banyak dan berkembang UMKM melalui dukungan modal khususnya kredit umum maka semakin banyak output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Meningkatnya output yang dihasilkan merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga semakin besar jumlah UMKM maka perekonomian regional suatu wilayah akan semakin meningkat.

Keseimbangan makro terbentuk dari persamaan agregat demand yang dipengaruhi oleh sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil yang merupakan keseimbangan pada pasar barang melalui keseimbangan investasi dan saving, akan menghasilkan kurva IS, yang nantinya akan membentuk hubungan antara tingkat suku bunga dan output nasional. Dalam sektor riil sendiri kebijakan yang berlaku yaitu kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang menyangkut peran pemerintah, seperti kebijakan pemerintah dalam menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Dalam sektor riil juga terdapat suatu efek yang dinamakan pigou efek, apabila terjadi kenaikan harga, maka akan menggeser kurva IS ke kiri.

Keseimbangan ekonomi secara makro dipengaruhi oleh kebijakan yang terkait pada dua sektor yaitu sektor fiskal atau kebijakan fiskal yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor yang kedua moneter atau kebijakan moneter. Sektor moneter merupakan sektor yang berhubungan dengan pasar uang, dalam pasar uang terdapat permintaan dan penawaran uang, sehingga terbentuk kurva LM, yang pada akhirnya akan membentuk hubungan antara suku bunga dan output nasional. Dalam sektor moneter, kebijakan yang berlaku yaitu kebijakan moneter, kebijakan ini dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam mengatur Jumlah Uang yang Beredar. Dan efek yang berlaku, yaitu Keynes efek, apabila terjadi kenaikan harga maka akan menggeser kurva LM ke kiri.

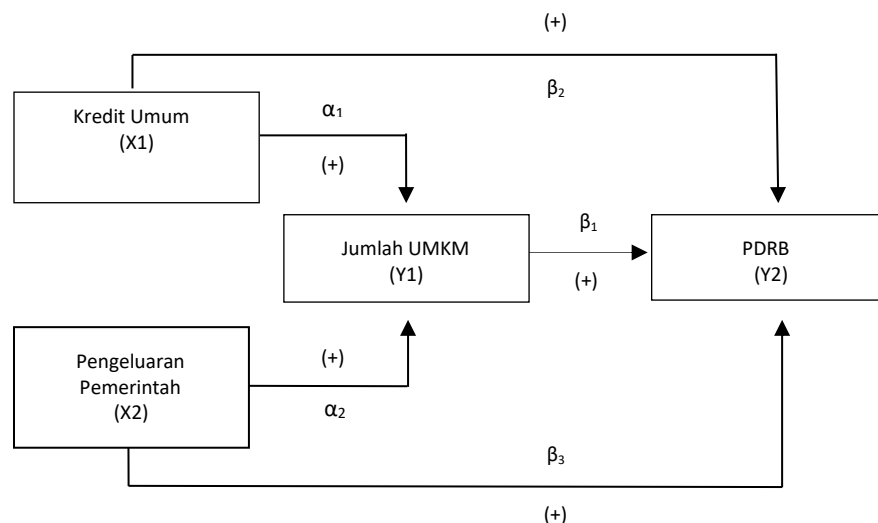
Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin adalah dengan adanya alternatif mata pencaharian salah satunya dengan implementasi UMKM yaitu dukungan aktivitas ekonomi yang ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah

(*Government Expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014).

Kebijakan fiskal berperan pada stabilisasi ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dipengaruhi pada sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Dona et al, 2013). Di satu sisi kebijakan moneter menunjukkan hubungan investasi dan saving dan tingkat suku bunga pada keseimbangan moneter. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan dalam mendukung produktifitas Jumlah UMKM sehingga akan menentukan tingkat kredit yang diberikan. Dan tingkat suku bunga signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi dan saving (Shiven, 2004).

Sehubungan dengan pemikiran ini, penulis membuat kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian ini sebagaimana tergambar pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat pengaruh kredit umum terhadap PDRB baik secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui jumlah usaha mikro kecil dan menengah.
2. Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB baik secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui jumlah usaha mikro kecil dan menengah.
3. Diduga terdapat pengaruh jumlah usaha mikro kecil dan menengah terhadap PDRB secara langsung (positif).